



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 162/SEK/PL1.2/VI/2024 Jakarta, 21 Juni 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu set
Hal : Verifikasi Data Indikatif Persertipikatan
Tanah TA 2025 di Lingkungan Mahkamah
Agung RI

Kepada
Yth. Pimpinan Satuan Kerja (*Daftar Terlampir*)
di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-57/KN/KN.2/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Permintaan Data Indikatif Pensertipikatan BMN Berupa Tanah TA 2025, Mahkamah Agung RI diminta untuk melakukan identifikasi status pensertipikatan tanah seluruh satuan kerja di bawahnya. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan upaya pengamanan aset negara melalui program pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah di Lingkungan Mahkamah Agung RI dengan maksud agar dapat dipertanggungjawabkan dari aspek legalitas dan akuntabilitas, serta tertib fisik, tertib administrasi dan tertib hukum.

Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi pada aplikasi Monitoring Sertipikat Tanah (Monserah) per 20 Juni 2024, terdapat 123 (seratus dua puluh empat) bidang tanah yang belum bersertipikat pada 82 (delapan puluh satu) satuan kerja dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Tanah masih dalam progres sertipikasi Tahun 2024	Tahapan Progres Sertipikasi Tanah Tahun 2024			
		Tahap persiapan (P0)	Tahapan pengajuan berkas (P1)	Tahapan berkas yang dikembalikan (P2)	Tahapan Pengukuran (P3)
1	2	3	4	5	6
Nominatif 2024	69	26	24	2	16
Belum Masuk Nominatif	54	50	3	-	3
Total	123	76	27	2	19

Detail: <https://bit.ly/MonitoringSertipikasiTanah2024>

Dari data di atas diperintahkan agar:

1. Satuan kerja yang sudah terdaftar dalam nominatif tahun 2024 dan belum mengajukan pensertipikatan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk segera berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk menyelesaikan proses percepatan sertipikasi sesuai ketentuan yang berlaku. **(Lampiran II)**
2. Satuan kerja yang belum masuk nominatif tahun 2024 namun tanahnya belum berstatus *Clean and Clear* agar melakukan verifikasi dan konfirmasi pada *link* berikut ini <https://bit.ly/VerifikasiTanahTahun2024> paling lambat **25 Juni 2024** serta wajib melaporkannya pada Pembina masing-masing wilayah. **(Lampiran III)**
3. Satuan kerja yang belum masuk nominatif tahun 2024 namun tanahnya sudah berstatus *Clean and Clear* agar segera berkoordinasi dengan KPKNL setempat dan mengajukan usulan untuk masuk nominatif tahun 2024 sehingga proses sertipikasi bisa dilakukan di tahun 2024. **(Lampiran IV)**
4. Satuan kerja yang masih memiliki kategori tanah “Bersertipikat Sebagian Bidang” agar segera melakukan verifikasi ulang terhadap jumlah bidang tanah, jumlah bidang tanah bersertipikat, luas tanah pada aplikasi SIMAN dan luas tanah pada aplikasi SAKTI pada *link* berikut ini <https://bit.ly/VerifikasiTanahTahun2024>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani secara elektronik



Sugiyanto

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
6. Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN.



Lampiran I

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 162/SEK/PL1.2/VI/2024

Tanggal : 21 Juni 2024

DAFTAR PIMPINAN SATUAN KERJA

- 1 DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI
- 2 Plt. KEPALA BIRO UMUM BADAN URUSAN ADMINISTRASI
- 3 KEPALA BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MA RI
- 4 KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
- 5 KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- 6 KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG
- 7 KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA
- 8 KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
- 9 KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
- 10 KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG
- 11 KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN
- 12 KETUA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
- 13 KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
- 14 KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA
- 15 KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
- 16 KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO
- 17 KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
- 18 KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
- 19 KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON
- 20 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
- 21 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
- 22 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
- 23 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA
- 24 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
- 25 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
- 26 KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
- 27 KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNGPINANG
- 28 KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
- 29 KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
- 30 KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
- 31 KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- 32 KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
- 33 KETUA MAHKAMAH SYARIAH BANDA ACEH
- 34 KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI
- 35 KETUA PENGADILAN NEGERI WONOGIRI
- 36 KETUA PENGADILAN NEGERI WATANSOPPENG
- 37 KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI
- 38 KETUA PENGADILAN NEGERI TIMIKA
- 39 KETUA PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
- 40 KETUA PENGADILAN NEGERI TERNATE
- 41 KETUA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG
- 42 KETUA PENGADILAN NEGERI TEBO
- 43 KETUA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
- 44 KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA
- 45 KETUA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG
- 46 KETUA PENGADILAN NEGERI TARAKAN
- 47 KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
- 48 KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG
- 49 KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI
- 50 KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG
- 51 KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- 52 KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA

53 KETUA PENGADILAN NEGERI SUMENEP
54 KETUA PENGADILAN NEGERI STABAT
55 KETUA PENGADILAN NEGERI SRAGEN
56 KETUA PENGADILAN NEGERI SORONG
57 KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
58 KETUA PENGADILAN NEGERI SINTANG
59 KETUA PENGADILAN NEGERI SINTANG
60 KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG
61 KETUA PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN
62 KETUA PENGADILAN NEGERI SERUI
63 KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG
64 KETUA PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO
65 KETUA PENGADILAN NEGERI SANANA
66 KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
67 KETUA PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT
68 KETUA PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU
69 KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOREJO
70 KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
71 KETUA PENGADILAN NEGERI POLEWALI
72 KETUA PENGADILAN NEGERI PASARWAJO
73 KETUA PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU
74 KETUA PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
75 KETUA PENGADILAN NEGERI PARIAMAN
76 KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
77 KETUA PENGADILAN NEGERI PALU
78 KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
79 KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN
80 KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
81 KETUA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
82 KETUA PENGADILAN NEGERI OELAMASI
83 KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
84 KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA
85 KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
86 KETUA PENGADILAN NEGERI MELONGUANE
87 KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM
88 KETUA PENGADILAN NEGERI MASOHI
89 KETUA PENGADILAN NEGERI MAROS
90 KETUA PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
91 KETUA PENGADILAN NEGERI MANNA
92 KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
93 KETUA PENGADILAN NEGERI MAJENE
94 KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
95 KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
96 KETUA PENGADILAN NEGERI LIWA
97 KETUA PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
98 KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
99 KETUA PENGADILAN NEGERI LARANTUKA
100 KETUA PENGADILAN NEGERI LANGSA
101 KETUA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
102 KETUA PENGADILAN NEGERI LABUHA
103 KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
104 KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE
105 KETUA PENGADILAN NEGERI KUPANG
106 KETUA PENGADILAN NEGERI KUNINGAN
107 KETUA PENGADILAN NEGERI KUDUS
108 KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG
109 KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU
110 KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG
111 KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN
112 KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI

113 KETUA PENGADILAN NEGERI KEDIRI
114 KETUA PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG
115 KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN
116 KETUA PENGADILAN NEGERI KARAWANG
117 KETUA PENGADILAN NEGERI KALIANDA
118 KETUA PENGADILAN NEGERI KALABAHI
119 KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
120 KETUA PENGADILAN NEGERI JENEPONTO
121 KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
122 KETUA PENGADILAN NEGERI JAMBI
123 KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
124 KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
125 KETUA PENGADILAN NEGERI GORONTALO
126 KETUA PENGADILAN NEGERI GARUT
127 KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
128 KETUA PENGADILAN NEGERI ENREKANG
129 KETUA PENGADILAN NEGERI DEMAK
130 KETUA PENGADILAN NEGERI CIBADAK
131 KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
132 KETUA PENGADILAN NEGERI BOYOLALI
133 KETUA PENGADILAN NEGERI BONTANG KELAS II
134 KETUA PENGADILAN NEGERI BIREUEN
135 KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI
136 KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKULU
137 KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI
138 KETUA PENGADILAN NEGERI BATANG
139 KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI
140 KETUA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
141 KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
142 KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
143 KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
144 KETUA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
145 KETUA PENGADILAN NEGERI BAJAWA
146 KETUA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
147 KETUA PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
148 KETUA PENGADILAN AGAMA TERNATE
149 KETUA PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI
150 KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN
151 KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR
152 KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB
153 KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
154 KETUA PENGADILAN AGAMA TALU
155 KETUA PENGADILAN AGAMA TAIS
156 KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT
157 KETUA PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR
158 KETUA PENGADILAN AGAMA SUKAMARA
159 KETUA PENGADILAN AGAMA STABAT
160 KETUA PENGADILAN AGAMA SLEMAN
161 KETUA PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
162 KETUA PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG
163 KETUA PENGADILAN AGAMA SIBUHUAN
164 KETUA PENGADILAN AGAMA SERANG
165 KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
166 KETUA PENGADILAN AGAMA SEKAYU
167 KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPANG
168 KETUA PENGADILAN AGAMA RUTENG
169 KETUA PENGADILAN AGAMA REMBANG
170 KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT
171 KETUA PENGADILAN AGAMA POLEWALI
172 KETUA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
173 KETUA PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAIAN
174 KETUA PENGADILAN AGAMA PAREPARE

175 KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG
176 KETUA PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG
177 KETUA PENGADILAN AGAMA PANDAN
178 KETUA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
179 KETUA PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN
180 KETUA PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK
181 KETUA PENGADILAN AGAMA MUNGKID
182 KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
183 KETUA PENGADILAN AGAMA MOROTAI
184 KETUA PENGADILAN AGAMA MANNA
185 KETUA PENGADILAN AGAMA MAGETAN
186 KETUA PENGADILAN AGAMA LUWUK
187 KETUA PENGADILAN AGAMA LABUHA
188 KETUA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO
189 KETUA PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
190 KETUA PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN
191 KETUA PENGADILAN AGAMA KOTABARU
192 KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN
193 KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
194 KETUA PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR
195 KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
196 KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
197 KETUA PENGADILAN AGAMA JENEPONTO
198 KETUA PENGADILAN AGAMA ENDE
199 KETUA PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP
200 KETUA PENGADILAN AGAMA CILEGON
201 KETUA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
202 KETUA PENGADILAN AGAMA BREBES
203 KETUA PENGADILAN AGAMA BINJAI
204 KETUA PENGADILAN AGAMA BELOPA
205 KETUA PENGADILAN AGAMA BARRU
206 KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI
207 KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
208 KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
209 KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG
210 KETUA PENGADILAN AGAMA BAJAWA
211 KETUA PENGADILAN AGAMA ATAMBUA
212 KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA
213 KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON
214 KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG
215 KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG
216 KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON
217 KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE
218 KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA
219 KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG
220 KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG
221 KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE
222 KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN
223 KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN

Sekretaris Mahkamah Agung RI,

Ditandatangani secara elektronik



Sugiyanto



Lampiran II

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor :162/SEK/PL1.2/VI/2024

Tanggal : 21 Juni 2024

Daftar Nominatif Tanah Tahun 2024

No	KODE_SATKER	Kode Wilayah	Wilayah	NAMA_SATKER	Nominatif	KODE_BARANG	NUP	LUAS TANAH
1	005010100526704000KD	100	Jakarta	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA	2024	2010101002	1	736
2	005010100526732000KD	100	Jakarta	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	2024	2010101001	4	1.200
3	005010199663157000KP	199	Badan Urusan Administrasi	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	2024	2010101003	3	617
4	005010199663157000KP	199	Badan Urusan Administrasi	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	2024	2010101003	4	1.474
5	005010199663157000KP	199	Badan Urusan Administrasi	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	2024	2010101003	5	1.540
6	005010200400662000KD	200	Jawa Barat	PENGADILAN AGAMA BANDUNG	2024	2010104001	2	2.770
7	005010300097755000KD	300	Jawa Tengah	PENGADILAN NEGERI KUDUS	2024	2010101001	4	354
8	005010300097720000KD	300	Jawa Tengah	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	2024	2010101002	9	1.050
9	005010300097720000KD	300	Jawa Tengah	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	2024	2010104001	1	4.000
10	005010300097720000KD	300	Jawa Tengah	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	2024	2010101002	7	250
11	005010300097720000KD	300	Jawa Tengah	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	2024	2010101002	8	220
12	005010500098413000KD	500	Jawa Timur	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN	2024	2010101001	1	391
13	005010600401633000KD	600	Aceh	MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN	2024	2010101002	1	800
14	005010600401689000KD	600	Aceh	MAHKAMAH SYAR'IYAH LANGSA	2024	2010101005	1	2250
15	005010600401642000KD	600	Aceh	MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON	2024	2010101005	1	1.178
16	005010600401658000KD	600	Aceh	MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON	2024	2010104001	3	7.500
17	005010600098497000KD	600	Aceh	PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWA	2024	2010101002	10	529
18	005010600401695000KD	600	Aceh	MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG	2024	2010101005	1	750
19	005010700682232000KD	700	Sumatera Utara	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	2024	2010101001	1	600
20	005010700682232000KD	700	Sumatera Utara	PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN	2024	2010104001	2	5.000

No	KODE_SATKER	Kode Wilayah	Wilayah	NAMA_SATKER	Nominatif	KODE_BARANG	NUP	LUAS TANAH
21	005010700401812000KD	700	Sumatera Utara	PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT	2024	2010104001	2	2.500
22	005010700401777000KD	700	Sumatera Utara	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	2024	2010104001	1	600
23	005010800098828000KD	800	Sumatera Barat	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING	2024	2010104001	2	681
24	005010800098792000KD	800	Sumatera Barat	PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	2024	2010104001	1	3.000
25	005010800098764000KD	800	Sumatera Barat	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO	2024	2010104001	2	20.000
26	005010800098743000KD	800	Sumatera Barat	PENGADILAN TINGGI PADANG	2024	2010101002	8	350
27	005010800098743000KD	800	Sumatera Barat	PENGADILAN TINGGI PADANG	2024	2010101002	9	350
28	005010800098743000KD	800	Sumatera Barat	PENGADILAN TINGGI PADANG	2024	2010101002	10	450
29	005010900402123000KD	900	Sumatera Barat	PENGADILAN AGAMA PASIR PANGARAIAN	2024	2010104001	4	602
30	005011000547661000KD	1000	Jambi	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	2024	2010101001	1	1.600
31	005011000477374000KD	1000	Jambi	PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN	2024	2010101001	1	4.528
32	005011100098942000KD	1100	Sumatera Selatan	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	2024	2010101001	1	1.008
33	005011100098942000KD	1100	Sumatera Selatan	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	2024	2010101002	2	780
34	005011100098942000KD	1100	Sumatera Selatan	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	2024	2010101002	4	1.500
35	005011100098942000KD	1100	Sumatera Selatan	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	2024	2010101002	5	464
36	005011100098942000KD	1100	Sumatera Selatan	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG	2024	2010101002	6	252
37	005011100526750000KD	1100	Sumatera Selatan	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG	2024	2010104001	3	8.000
38	005011400401869000KD	1400	Kalimantan Tengah	PENGADILAN AGAMA SUKAMARA	2024	2010104001	1	7.750
39	005011900099422000KD	1900	Sulawesi Selatan	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	2024	2010101002	3	900
40	005011900099422000KD	1900	Sulawesi Selatan	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	2024	2010101002	4	200
41	005011900099422000KD	1900	Sulawesi Selatan	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	2024	2010101002	5	200
42	005011900099418000KD	1900	Sulawesi Selatan	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	2024	2010104001	3	1.500

No	KODE_SATKER	Kode Wilayah	Wilayah	NAMA_SATKER	Nominatif	KODE_BARANG	NUP	LUAS TANAH
43	005011900099418000KD	1900	Sulawesi Selatan	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	2024	2010101001	2	198
44	005011900099418000KD	1900	Sulawesi Selatan	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	2024	2010101002	1	600
45	005011900099418000KD	1900	Sulawesi Selatan	PENGADILAN TINGGI MAKASSAR	2024	2010101002	2	1.400
46	005012300099862000KD	2300	Nusa Tenggara Barat	PENGADILAN NEGERI MATARAM	2024	2010101003	1	2.600
47	005012300099862000KD	2300	Nusa Tenggara Barat	PENGADILAN NEGERI MATARAM	2024	2010104001	6	4
48	005012300099862000KD	2300	Nusa Tenggara Barat	PENGADILAN NEGERI MATARAM	2024	2010101001	9	755
49	005012400400007000KD	2400	Nusa Tenggara Timur	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA	2024	2010104004	4	1.000
50	005012400681418000KD	2400	Nusa Tenggara Timur	PENGADILAN NEGERI OELAMASI	2024	2010101003	2	2.000
51	005012500400276000KD	2500	Papua	PENGADILAN NEGERI SERUI	2024	2010101001	3	450
52	005012500400038000KD	2500	Papua	PENGADILAN NEGERI JAYAPURA	2024	2010104001	2	509
53	005012500614890000KD	2500	Papua	PENGADILAN NEGERI TIMIKA	2024	2010101003	1	5.000
54	005012500400022000KD	2500	Papua	PENGADILAN TINGGI JAYAPURA	2024	2010101001	1	3.340
55	005012600308014000KD	2600	Bengkulu	PENGADILAN AGAMA MANNA	2024	2010202002	1	386
56	005012800307818000KD	2800	Maluku Utara	PENGADILAN AGAMA LABUHA	2024	2010101002	1	200
57	005012800307796000KD	2800	Maluku Utara	PENGADILAN AGAMA MOROTAI	2024	2010104001	1	365
58	005012800307782000KD	2800	Maluku Utara	PENGADILAN AGAMA TERNATE	2024	2010101005	1	410
59	005012800099731000KD	2800	Maluku Utara	PENGADILAN NEGERI TERNATE	2024	2010101001	9	200
60	005012900097598000KD	2900	Banten	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	2024	2010101001	8	800
61	005012900097598000KD	2900	Banten	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	2024	2010101002	2	600
62	005012900097598000KD	2900	Banten	PENGADILAN NEGERI TANGERANG	2024	2010101002	4	360
63	005013000402302000KD	3000	Sumatera Selatan	PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG	2024	2010104001	3	1.431
64	005013100664539000KD	3100	Gorontalo	PENGADILAN TINGGI GORONTALO	2024	2010104001	4	10.750
65	005013100099361000KD	3100	Gorontalo	PENGADILAN NEGERI GORONTALO	2024	2010104001	11	4.850
66	005013300400081000KD	3300	Papua Barat	PENGADILAN NEGERI FAKFAK	2024	2010101005	1	1.615
67	005013300400075000KD	3300	Papua Barat	PENGADILAN NEGERI SORONG	2024	2010104001	2	1.999

No	KODE_SATKER	Kode Wilayah	Wilayah	NAMA_SATKER	Nominatif	KODE_BARANG	NUP	LUAS TANAH
68	005013500417657000KD	3500	Kalimantan Utara	PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR	2024	2010104001	3	22.500
69	005013500402675000KD	3500	Kalimantan Utara	PENGADILAN AGAMA TARAKAN	2024	2010104001	2	3.900

Sekretaris Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani secara elektronik



Sugiyanto



Lampiran III

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor :162/SEK/PL1.2/VI/2024

Tanggal : 21 Juni 2024

Daftar Tanah Belum Masuk Nominatif Tahun 2024 dan StatusTanah Belum *clean and clear*

No	KODE_SATKER	Kode Wilayah	Wilayah	NAMA_SATKER	KODE_BARANG	NUP	LUAS_TANAH
1	005010700401880000KD	700	Sumatera Utara	PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN	2010104001	5	5.000
2	005011300099087000KD	1300	Kalimantan Barat	PENGADILAN NEGERI SINTANG	2010101001	2	400
3	005011700401925000KD	1700	Sulawesi Utara	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE	2010104004	1	1.987
4	005012300307892000KD	2300	Nusa Tenggara Barat	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR	2010104001	3	700
5	005012300307892000KD	2300	Nusa Tenggara Barat	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR	2010104001	4	200
6	005012300307892000KD	2300	Nusa Tenggara Barat	PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR	2010104001	5	999
7	005012500614890000KD	2500	Papua	PENGADILAN NEGERI TIMIKA	2010104001	2	3.000
8	005010500098409000KD	500	Jawa Timur	PENGADILAN NEGERI SUMENEP	2010104001	6	2.390
9	005010500401369000KD	500	Jawa Timur	PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI	2010101001	2	204
10	005010500401375000KD	500	Jawa Timur	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI	2010101001	1	130
11	005010500401551000KD	500	Jawa Timur	PENGADILAN AGAMA SAMPANG	2010106001	1	25
12	005010700401812000KD	700	Sumatera Utara	PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT	2010104001	3	5.195
13	005010700547682000KD	700	Sumatera Utara	PENGADILAN AGAMA STABAT	2010104001	3	1.127
14	005010700547682000KD	700	Sumatera Utara	PENGADILAN AGAMA STABAT	2010104001	2	420
15	005011000652020000KD	1000	Jambi	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	2010101001	1	2.000
16	005011100672969000KD	1100	Sumatera Selatan	PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM	2010104001	2	600
17	005011200477306000KD	1200	Lampung	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	2010202002	1	4.063
18	005011200477306000KD	1200	Lampung	PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG	2010202002	2	218
19	005011200614883000KD	1200	Lampung	PENGADILAN NEGERI LIWA	2010104001	8	10.061
20	005011400401876000KD	1400	Kalimantan Tengah	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	2010104001	3	19.988
21	005011400401876000KD	1400	Kalimantan Tengah	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	2010104001	4	9.809
22	005011400401876000KD	1400	Kalimantan Tengah	PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN	2010104001	5	4.367
23	005011500099180000KD	1500	Kalimantan Selatan	PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN	2010104001	5	10.000
24	005011800307300000KD	1800	Sulawesi Tengah	PENGADILAN AGAMA LUWUK	2010106001	1	156

No	KODE_SATKER	Kode Wilayah	Wilayah	NAMA_SATKER	KODE_BARANG	NUP	LUAS_TANAH
25	005012000400540000KD	2000	Sulawesi Tenggara	PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA	2010104001	5	10.000
26	005012100099691000KD	2100	Maluku	PENGADILAN TINGGI AMBON	2010101001	10	270
27	005012300526736000KD	2300	Nusa Tenggara Barat	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM	2010104001	1	7.773
28	005012800664522000KD	2800	Maluku Utara	PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA	2010101001	2	10.000
29	005012900417850000KD	2900	Banten	PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG	2010104001	3	5.121
30	005013000403092000KD	3000	Bangka Belitung	PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT	2010202002	3	5.771
31	005013000403092000KD	3000	Bangka Belitung	PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT	2010202002	2	5.000
32	005013400307630000KD	3400	Sulawesi Barat	PENGADILAN AGAMA POLEWALI	2010104001	1	1.500
33	005013500526720000KD	3500	Kalimantan Utara	PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA	2010104001	1	22.500
34	005030199097450000KP	199	Satker Pusat	DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	2010307009	1	348
35	005012400400163000KD	2400	Nusa Tenggara Timur	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	2010101002	1	1.100
36	005012400400163000KD	2400	Nusa Tenggara Timur	PENGADILAN NEGERI KALABAHI	2010202002	2	205

Sekretaris Mahkamah Agung RI,

Ditandatangani secara elektronik



Sugiyanto



Lampiran IV
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor :162/SEK/PL1.2/VI/2024
Tanggal : 21 Juni 2024

Daftar Tanah Belum Masuk Nominatif Tahun 2024 dan Status Tanah *clean and clear*

No	KODE_SATKER	Kode Wilayah	Wilayah	NAMA_SATKER	KODE_BARANG	NUP	LUAS_TANAH
1	005010100097492000KD	100	Jakarta	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	2010104001	2	6.458
2	005010300097720000KD	300	Jawa Tengah	PENGADILAN NEGERI SEMARANG	2010101002	6	1.100
3	005010500098104000KD	500	Jawa Timur	PENGADILAN TINGGI SURABAYA	2010101001	15	1.650
4	005010500663314000KD	500	Jawa Timur	PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA	2010104001	1	1.974
5	005010600098476000KD	600	Aceh	PENGADILAN NEGERI BIREUEN	2010101001	2	1.860
6	005010600098476000KD	600	Aceh	PENGADILAN NEGERI BIREUEN	2010101001	3	548
7	005010600098476000KD	600	Aceh	PENGADILAN NEGERI BIREUEN	2010101001	4	385
8	005010600098476000KD	600	Aceh	PENGADILAN NEGERI BIREUEN	2010101001	6	210
9	005010600098519000KD	600	Aceh	PENGADILAN NEGERI LANGSA	2010101001	5	334
10	005010600098551000KD	600	Aceh	PENGADILAN NEGERI KUTACANE	2010101001	6	400
11	005011300400194000KD	1300	Kalimantan Barat	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	2010101001	1	800
12	005011300400194000KD	1300	Kalimantan Barat	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	2010101001	2	1.600
13	005011300400194000KD	1300	Kalimantan Barat	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	2010101001	3	4.000
14	005011300400194000KD	1300	Kalimantan Barat	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	2010104001	2	1.443
15	005011300400194000KD	1300	Kalimantan Barat	PENGADILAN NEGERI PUTUSSIBAU	2010104001	3	4.000
16	005011900099422000KD	1900	Sulawesi Selatan	PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	2010101002	2	397
17	005011900307487000KD	1900	Sulawesi Selatan	PENGADILAN AGAMA BARRU	2010104001	3	3.500
18	005030199097450000KP	199	Satker Pusat	DITJEN BADAN PERADILAN UMUM	2010101001	4	716

Sekretaris Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani secara elektronik



Sugiyanto



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code atau melalui aplikasi BeSign atau Panter (<https://bsre.bssn.go.id/repository>).